REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ORIENTAL URUGUAY
MENGENAI
PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay, selanjutnya disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama sebagai "Para Pihak";

MENGINGAT hubungan bersahabat yang terjalin antara kedua negara;

BERHASRAT untuk menyederhanakan prosedur terkait saling kunjung warga negara kedua negara, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas, ke Republik Indonesia dan Republik Oriental Uruguay;

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1
PEMBEBASAN VISA

1. Warga negara Republik Indonesia, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh visa untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah Republik Oriental Uruguay untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

2. Warga negara Republik Oriental Uruguay, pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas yang sah wajib tidak dipersyaratkan untuk memperoleh via untuk masuk, singgah, atau tinggal di wilayah Republik Indonesia untuk suatu jangka waktu yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal masuk.

PASAL 2
MASA BERLAKU PASPOR

Masa berlaku paspor dari warga negara masing-masing Pihak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum memasuki wilayah Pihak lainnya.

PASAL 3
TEMPAT-TEMPAT PEMERIKSAAN KEDATANGAN

Warga negara salah satu Pihak pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah wajib masuk ke dalam wilayah Pihak lainnya melalui tempat-tempat pemeriksaan kedatangan yang dibuka untuk lalu lintas penumpang internasional.

PASAL 4
VISA BAGI ANGGOTA MISI DIPLOMATIK DAN KONSULER

Warga negara dari salah satu Pihak yang merupakan pemegang paspor diplomatik atau dinas yang sah dan ditugaskan sebagai anggota misi diplomatik atau konsuler di wilayah Pihak lain, termasuk anggota keluarga mereka, wajib dipersyaratkan untuk memperoleh visa masuk yang tepat dari Kedutaan Besar Pihak lainnya sebelum memasuki wilayah Pihak tersebut.

PASAL 5
PEMBATASAN VISA

Pemegang paspor yang sah dari salah satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini dapat masuk dan keluar dari wilayah Pihak lainnya

melalui titik yang diijinkan untuk tujuan tersebut oleh pihak imigrasi yang berwenang, tanpa pembatasan apapun kecuali yang telah ditentukan bagi syarat-syarat keamanan, migrasi, bea cukai, kesehatan, dan lainnya yang secara hukum dapat diterapkan kepada pemegang paspor diplomatik atau dinas.

PASAL 6
HAK PENOLAKAN

Salah satu Pihak berhak untuk menolak memberikan izin masuk atau memperpendek masa tinggal setiap orang yang diberikan pembebasan visa dan fasilitas-fasilitas berdasarkan Persetujuan ini apabila dianggap bahwa orang tersebut tidak dikehendaki.

PASAL 7
CONTOH PASPOR

Para Pihak wajib saling bertukar, melalui saluran diplomatik, contoh-contoh paspor yang dipergunakan oleh masing-masing Pihak 30 (tiga puluh) hari sebelum Persetujuan ini mulai berlaku serta setiap contoh paspor baru sebelum mulai diterbitkan.

PASAL 8
PENANGGUHAN

1. Masing-masing Pihak, dapat, setiap saat, menangguhkan sementara Persetujuan ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dengan alasan-alasan keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan publik.

2. Pemberlakuan dan pengakhiran kebijakan-kebijakan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 1 Pasal ini wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya, 30 (tiga puluh) hari sebelumnya melalui saluran diplomatik.

PASAL 9
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMALSUAN

1. Para Pihak wajib memberikan terhadap paspor diplomatik dan dinasnya pengamanan dengan tingkat tertinggi terhadap pemalsuan.

2. Salah satu Pihak wajib memberitahukan Pihak lainnya apabila diduga seseorang memasuki Wilayah Pihak lainnya dengan paspor diplomatik atau dinas yang palsu.

3. Pejabat berwenang di negara Pihak yang menerima dapat menjalankan haknya terhadap orang tersebut menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul di antara Para Pihak terhadap penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau perundingan diantara Para Pihak.

PASAL 11
PERUBAHAN

Salah satu Pihak dapat mengirimkan permintaan secara tertulis terhadap perubahan secara sebagian maupun keseluruhan Persetujuan ini. Perubahan tersebut wajib dilakukan melalui persetujuan bersama antara Para Pihak, dan wajib mulai berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dari Persetujuan ini.

PASAL 12
MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU, DAN PENGAKHIRAN

1. Persetujuan ini wajib mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir, dimana Para Pihak saling

memberitahukan, melalui saluran diplomatik, bahwa semua persyaratan internal untuk mulai berlakunya Persetujuan ini, sebagaimana tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan nasionalnya telah dipenuhi.

2. Persetujuan ini, wajib berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memutuskan untuk mengakhiri Persetujuan ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya melalui saluran diplomatik 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT di Nusa Dua, Bali, pada hari ketigabelas bulan Juni, tahun dua ribu tiga belas, dalam dua rangkap asli, dalam Bahasa Indonesia, Spanyol dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	**UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK ORIENTAL URUGUAY**
DIAN TRIANSYAH DJANI	**LUIS PORTO**
Direktur Jenderal Amerika dan Eropa	Wakil Menteri Luar Negeri

REPUBLIK INDONESIA

ACUERDO
ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE INDONESIA
Y
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
SOBRE
EXENCIÓN DE VISAS PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, OFICIALES Y DE SERVICIO

El Gobierno de la República de Indonesia y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en adelante denominados en forma individual como la "Parte" y en forma colectiva, como las "Partes";

RECONOCIENDO las relaciones de amistad existentes entre los dos países;

DESEANDO simplificar los procedimientos relacionados con las visitas de nacionales de ambos países, titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio, a la República de Indonesia y a la República Oriental del Uruguay;

CONFORME a las leyes y reglamentaciones vigentes en los respectivos países;

HAN ACORDADO LO SIGUENTE:

ARTÍCULO 1
EXENCIÓN DE VISA

1. Los nacionales de la República de Indonesia, titulares de pasaportes diplomáticos o de servicio válidos estarán exentos del requisito de obtención de visa para el ingreso, tránsito o estadía en el territorio de la República

Oriental del Uruguay por un período que no supere los 30 (treinta) días a partir de la fecha de entrada.

2. Los nacionales de la República Oriental del Uruguay, titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicios válidos estarán exentos del requisito de obtención de visa para el ingreso, tránsito o estadía en el territorio de la República de Indonesia por un período que no supere los 30 (treinta) días a partir de la fecha de entrada.

ARTÍCULO 2
VIGENCIA DEL PASAPORTE

El pasaporte de los nacionales de cualquiera de las Partes tendrá una vigencia de por los menos (seis) meses previo al ingreso al territorio de la otra Parte.

ARTÍCULO 3
PUNTOS DE CONTROL

Los nacionales de una Parte titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y/o de servicio ingresarán al territorio de la otra Parte a través de puntos de control abiertos al tráfico internacional de pasajeros.

ARTÍCULO 4
VISA PARA MIEMBROS DE MISIONES DIPLOMÁTICAS O CONSULARES

Los nacionales de cualquiera de las Partes titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio válidos, designados como miembros de una misión diplomática o consular en el territorio de la otra Parte, incluidos los integrantes de su familia, deberán obtener la correspondiente visa de entrada en la Embajada de la otra Parte previo a su ingreso.

ARTÍCULO 5
RESTRICCIÓN DE VISAS

Los titulares de pasaportes válidos de cualquiera de las Partes a los que refiere el presente Acuerdo podrán ingresar y salir del territorio de la otra parte por cualquier punto autorizado a esos efectos por las autoridades de migración competentes, sin restricción salvo por las estipuladas en reglamentaciones en materia de seguridad, migración, aduana, salud así como en otras reglamentaciones que puedan ser legalmente aplicables a los titulares de pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio.

ARTÍCULO 6
DERECHO DE RECHAZO

Cada Parte se reserva el derecho de rechazar el ingreso o reducir el período de estadía de cualquier persona habilitada a obtener la exención de visa y facilidades previstas en el presente Acuerdo si considera que la persona es indeseable.

ARTÍCULO 7
EJEMPLARES DE PASAPORTES

Las Partes intercambiarán, a través de la vía diplomática, ejemplares de sus pasaportes utilizados por cada Parte 30 (treinta) días previo a la entrada en vigor del presente Acuerdo así como ejemplares de cualquier pasaporte nuevo previo a su introducción.

ARTÍCULO 8
SUSPENSIÓN

1. Cada Parte, podrá, en cualquier momento, suspender provisoriamente la totalidad o parte del presente Acuerdo por razones de seguridad nacional, orden público o salud pública.

2. La introducción así como la terminación de las medidas establecidas en el Párrafo 1 del presente Artículo serán debidamente comunicadas a la otra Parte con 30 (treinta) días de antelación, a través de la vía diplomática.

ARTÍCULO 9
PROTECCIÓN CONTRA FALSIFICACIÓN

1. Las Partes otorgarán a sus pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio el mayor nivel de protección contra falsificación.

2. Una Parte informará a la otra si sospecha que una persona ingresa al territorio de una de ellas con pasaporte diplomático, oficial y de servicio falsificados.

3. Las autoridades de la Parte receptora podrán ejercer sus derechos respecto de dicha persona conforme a las leyes y reglamentaciones vigentes.

ARTÍCULO 10
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier disputa entre las Partes sobre la interpretación o implementación del presente Acuerdo se resolverá en forma amistosa a través de consultas o negociaciones entre las Partes.

ARTÍCULO 11
ENMIENDA

Cualquier Parte podrá solicitar por escrito que se enmiende la totalidad o parte del presente Acuerdo. La adopción de la enmienda se efectuará de común acuerdo entre las Partes, y entrará en vigor conforme lo dispuesto por el Artículo 12 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 12
ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TERMINACIÓN

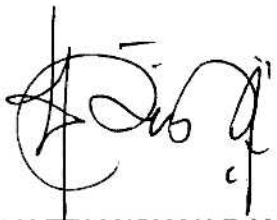
1. El presente Acuerdo entrará en vigor a los 30 (treinta) días siguientes a la fecha de recepción de la última notificación escrita mediante la cual las Partes se notifican recíprocamente, a través de la vía diplomática, que se han cumplido todos los requisitos para la entrada en vigor del presente Acuerdo, conforme lo establecido en sus respectivas legislaciones nacionales.

2. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período de 5 (cinco) años y podrá ser renovado automáticamente por períodos siguientes de 5 (cinco) años, a menos que cualquiera de las Partes decida denunciarlo mediante notificación escrita cursada a la otra Parte a través de la vía diplomática con 90 (noventa) días de antelación a la fecha estimada de finalización.

EN FE DE ELLO, los abajo suscritos, habiendo sido debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

HECHO en nusa dua, bali el día de trece de junio del año 2013, por duplicado, en idioma indonesio, español e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de diferencias en la interpretación, prevalecerá el texto en inglés.

POR EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
DE INDONESIA



DIAN TRIANSYAH DJANI
Director General
para América y Europa

POR EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY



LUIS PORTO
Viceministro
de Relaciones Exteriores

REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY
ON
VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, OFFICIAL, OR SERVICE PASSPORTS

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Oriental Republic of Uruguay, hereinafter referred to individually as a "Party" and collectively as the "Parties";

RECOGNIZING the existing friendly relations between the two countries;

DESIRING to simplify procedures related to visits of nationals of both countries, holders of diplomatic, official, or service passports, to the Republic of Indonesia and the Oriental Republic of Uruguay;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of the respective countries;

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
VISA EXEMPTION

1. Nationals of the Republic of Indonesia, holders of valid diplomatic, official, or service passports shall not be required to obtain visas to enter, transit through, or stay in the territory of the Oriental Republic of Uruguay for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry.

2. Nationals of the Oriental Republic of Uruguay, holders of valid diplomatic, official, or service passports shall not be required to obtain visas to enter,

transit through, or stay in the territory of the Republic of Indonesia for a period which does not exceed 30 (thirty) days from the date of entry.

ARTICLE 2
DURATION OF PASSPORT VALIDITY

The duration of passport validity of nationals of either Party shall be at least 6 (six) months before entering the territory of the other Party.

ARTICLE 3
CHECK-POINTS ENTRY

The nationals of the Party holding diplomatic, official, or service passports shall enter the territory of the other Party through check-points open for international passenger traffic.

ARTICLE 4
VISA FOR MEMBER OF DIPLOMATIC AND CONSULAR MISSIONS

Nationals of either Party who are holders of valid diplomatic, official, or service passports and assigned as member of diplomatic or consular mission in the territory of the other Party, including their family members, shall be required to obtain appropriate entry visa from the Embassy of the other Party prior to their entry.

ARTICLE 5
VISA RESTRICTION

The holders of the valid passports of either Party referred to this Agreement may enter into and depart from the territory of other Party by any point authorized for that purpose by the competent immigration authorities, without any restriction except for those stipulated in the security, migratory, customs,

sanitary, and other regulations which may be legally applicable to holders of diplomatic, official, or service passports.

ARTICLE 6
RIGHT OF REFUSAL

Either Party reserves the right to refuse admission of entry or shorten the duration of stay of any person entitled to visa exemption and facilities under this Agreement if it considers that person undesirable.

ARTICLE 7
SPECIMEN OF PASSPORT

The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens of their passports being used by each Party 30 (thirty) days before the entry into force of this Agreement as well as specimens of any new passports before their introduction.

ARTICLE 8
SUSPENSION

1. Each Party may, at any time, temporarily suspend all or part of this Agreement for reasons of national security, public order or public health.

2. The introduction as well as termination of the measures stated in Paragraph 1 of this Article shall be duly informed to the other Party 30 (thirty) days in advance through diplomatic channels.

ARTICLE 9
PROTECTION AGAINST COUNTERFEITING

1. The Parties shall provide their diplomatic, official, or service passports with the highest level of protection against counterfeiting.

2. A Party shall inform the other Party if it suspects that a person enters the territory of a Party with counterfeited diplomatic, official, or service passports.

3. Authorities of the receiving Party may exercise its rights to such person according to the prevailing laws and regulations.

ARTICLE 10
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Parties on the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties.

ARTICLE 11
AMENDMENT

Either Party may request in writing an amendment of all or part of this Agreement. The adoption of amendment shall be done by common agreement between the Parties, and shall enter into force as indicated in Article 12 of this Agreement.

ARTICLE 12
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force 30 (thirty) days from the date of the receipt of the last written notification in which the Parties inform each other, through diplomatic channels, that all requirements for the entry into force of this Agreement, as stipulated under their respective national legislation, have been fulfilled.

2. This Agreement, shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be renewed automatically for further period of 5 (five) years, unless either Party decides to terminate this Agreement by giving written notice to the

other Party through diplomatic channels 90 (ninety) days prior to the expected termination date.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Government, have signed this Agreement.

DONE in Nusa Dua, Bali on this thirteenth day of June, in the year two thousand and thirteen, in duplicate, in the Indonesian, Spanish, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any differences of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIAN TRIANSYAH DJANI
Director General for America and Europe

FOR THE GOVERNMENT OF THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY

LUIS PORTO
Vice Minister of Foreign Affairs